



Membangun Indonesia dari Akar Budaya Nusantara

Oleh: Rudy C Tarumingkeng



Oleh:

[Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD](#)

Professor of Management NUP: 9903252922

Rektor, Universitas Cenderawasih, Papua (1978-1988, dan
Rektor, Kampus AGRO Manokwari sekarang Universitas Papua Manokwari)

Coordinator, CIDA/DIKTI SFU Burnaby BC Canada 1988-1991

Rektor, Universitas Kristen Krida Wacana, Jakarta (1991-2000)

Ketua Dewan Guru Besar, IPB-University, Bogor (2005-2006)

AI - Data Analyst, dan Ketua Senat Akademik, IBM-ASMI, Jakarta 2024-

© RudyCT Academic Series

rudyct75@gmail.com

9 Maret 2026

MEMBANGUN INDONESIA DARI AKAR BUDAYA NUSANTARA

Pendahuluan

Membangun Indonesia tidak dapat dipahami hanya sebagai proses memperluas jalan raya, membangun pelabuhan, mendirikan pabrik, mempercepat digitalisasi, atau menaikkan angka pertumbuhan ekonomi. Semua itu penting, tetapi tidak cukup. Negara pada akhirnya dibangun di atas manusia, dan manusia hidup di dalam nilai, bahasa, simbol, ingatan kolektif, kebiasaan, dan cara pandang tentang kehidupan bersama. Karena itu, pembangunan yang tidak berangkat dari akar budaya cenderung menghasilkan kemajuan yang tampak secara fisik, tetapi rapuh secara sosial. Dalam konteks Indonesia, masalah ini menjadi sangat penting karena bangsa ini lahir bukan dari keseragaman, melainkan dari kemampuan menyatukan keragaman yang luar biasa luas. BPS menegaskan bahwa pengelompokan data suku dari SP2010 menghasilkan 633 kelompok suku besar, sementara Indonesia juga terus dibaca sebagai masyarakat yang sangat heterogen. Pada saat yang sama, Badan Bahasa masih mencatat 718 bahasa daerah, dan hingga 2025 program revitalisasi telah menjangkau 120 bahasa daerah di 38 provinsi. Data ini menunjukkan bahwa budaya bukan unsur pinggiran dalam Indonesia; budaya adalah struktur dasar kehidupan nasional. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Karena itu, gagasan “membangun Indonesia dari akar budaya Nusantara” bukan seruan romantik untuk kembali ke masa lalu, melainkan strategi pembangunan yang rasional. Akar budaya menyediakan orientasi moral, rasa memiliki, kepercayaan sosial, dan energi kolektif yang membuat kebijakan publik lebih efektif. UNESCO menegaskan bahwa budaya merupakan **driver** sekaligus **enabler** pembangunan berkelanjutan: budaya menghasilkan manfaat sosial-ekonomi secara langsung dan juga meningkatkan efektivitas intervensi pembangunan. Di level nasional, RPJMN 2025–2029 menegaskan bahwa pembangunan manusia seutuhnya bertumpu pada tiga pilar, yaitu pemenuhan layanan dasar, pembangunan modal manusia, dan pembangunan modal sosial budaya. Ini berarti kebudayaan bukan tambahan setelah pembangunan selesai, tetapi bagian dari fondasi pembangunan itu sendiri. ([UNESCO](#))

Esai ini berargumen bahwa Indonesia akan lebih kokoh bila dibangun dari akar budaya Nusantara. Yang dimaksud bukan menjadikan budaya sebagai pajangan seremonial, melainkan menempatkannya sebagai sumber etika pembangunan, basis kohesi sosial, penopang tata kelola, pendorong ekonomi kreatif, sarana pendidikan karakter, dan fondasi keberlanjutan. Dalam kerangka itu, pembangunan bukanlah proses meninggalkan budaya demi modernitas, tetapi proses mentransformasikan warisan budaya menjadi energi kemajuan nasional. ([UNESCO](#))

1. Indonesia sebagai bangsa yang dibangun dari keberagaman

Indonesia adalah bangsa yang unik karena dibentuk oleh perjumpaan antarpulau, antarsuku, antarbahasa, antartradisi, dan antaragama. Sejarah Indonesia tidak berjalan dari satu pusat budaya tunggal yang kemudian menelan yang lain, melainkan dari proses panjang negosiasi, perjumpaan, pertukaran, dan integrasi. Hal itu menjelaskan mengapa kemajemukan bukan gangguan bagi Indonesia, melainkan kondisi

asalnya. BPS menyatakan bahwa Indonesia sangat heterogen, tetapi tidak terpolar secara ekstrem. Ini berarti keragaman Indonesia memang luas, tetapi masih memiliki kemungkinan besar untuk dikelola dalam bingkai kebangsaan. Fakta sosiologis seperti ini penting karena pembangunan nasional selalu berlangsung di dalam masyarakat yang majemuk. Setiap kebijakan pendidikan, kesehatan, ekonomi, tata ruang, atau transformasi digital pada akhirnya akan berinteraksi dengan keragaman budaya yang nyata. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Pandangan tersebut sejalan dengan cara negara merumuskan kebudayaan nasional. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan menempatkan kebudayaan nasional Indonesia sebagai keseluruhan proses dan hasil interaksi antar-kebudayaan yang hidup dan berkembang di Indonesia. Formulasi ini sangat penting. Ia menegaskan bahwa kebangsaan Indonesia tidak dibangun dengan menghapus budaya daerah, tetapi dengan menjadikan interaksi antarkebudayaan sebagai fondasi identitas nasional. Karena itu, pembangunan Indonesia yang sehat juga harus mengikuti logika yang sama: bukan menyeragamkan semua wilayah dan komunitas, melainkan membangun atas dasar pengakuan dan penghubungan antarkeragaman. (perpustakaan.bappenas.go.id)

Dalam konteks ini, semboyan Bhinneka Tunggal Ika bukan slogan kosmetik. Dalam publikasi diplomasi Indonesia, keberagaman budaya, bahasa, etnik, dan religiositas diikat oleh semboyan nasional "unity in diversity", sementara harmoni dipandang sebagai kebutuhan. Artinya, keberagaman di Indonesia tidak cukup hanya diakui sebagai realitas; ia harus diolah menjadi harmoni. Pembangunan negara yang mengabaikan realitas ini akan mudah jatuh pada pendekatan teknokratis yang asing bagi masyarakatnya. Sebaliknya, pembangunan yang berangkat dari akar budaya akan lebih mampu menyusun kebijakan yang manusiawi, kontekstual, dan diterima secara sosial. (kemlu.go.id)

2. Apa yang dimaksud dengan “akar budaya Nusantara”?

Istilah “akar budaya Nusantara” perlu dipahami secara luas. Ia tidak hanya merujuk pada seni tradisional, tarian daerah, pakaian adat, atau ritual tertentu. Dalam kerangka kebijakan kebudayaan Indonesia, ruang budaya mencakup tradisi lisan, bahasa, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, permainan rakyat, dan olahraga tradisional. Dengan kata lain, akar budaya adalah jaringan makna yang membentuk cara masyarakat berbicara, bekerja, menghormati, mengingat, merawat alam, mengasuh anak, menyelesaikan konflik, dan membayangkan masa depan. Jadi, membangun dari akar budaya berarti membangun dengan memahami cara hidup masyarakat secara utuh, bukan hanya menggunakan simbol-simbol budayanya. (perpustakaan.bappenas.go.id)

Akar budaya juga tidak identik dengan sesuatu yang statis. Budaya hidup karena diwariskan, diolah, dipraktikkan, dan disesuaikan dengan zaman. UNESCO menegaskan bahwa budaya harus dipahami dalam kaitannya dengan keberlanjutan, kreativitas, pendidikan, dan kebijakan publik. Ini berarti budaya bukan benda museum. Ia dapat menjadi sumber inovasi justru karena menyimpan cara-cara lokal dalam memahami relasi manusia, komunitas, alam, dan kerja. Dengan demikian, “akar” bukan berarti mundur ke belakang, melainkan titik pijak yang memberi arah ketika masyarakat bergerak ke depan. Bangsa yang tercerabut dari akar budayanya cenderung kehilangan orientasi; bangsa yang bertumpu pada akarnya memiliki peluang lebih besar untuk berubah tanpa hancur.

(UNESCO)

Dalam konteks Indonesia, akar budaya Nusantara bersifat plural. Akar itu bukan satu, tetapi banyak: Jawa, Sunda, Batak, Minahasa, Bugis, Bali, Dayak, Papua, Ambon, Sasak, Madura, dan banyak lainnya. Justru karena banyak itulah Indonesia memiliki kekayaan etnis dan sosial yang besar. Tantangannya bukan memilih satu akar untuk semua, melainkan

membangun jembatan antarakar budaya tersebut agar menjadi sistem penyangga bangsa. Di sinilah pembangunan budaya bertemu dengan pembangunan negara. Negara yang bijak bukan negara yang memaksakan uniformitas, tetapi negara yang mampu mengubah pluralitas akar budaya menjadi energi nasional yang produktif. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

3. Budaya sebagai modal sosial pembangunan

Salah satu alasan utama mengapa Indonesia harus dibangun dari akar budaya adalah karena budaya menghasilkan modal sosial. Modal sosial adalah jaringan kepercayaan, norma timbal balik, solidaritas, dan kemampuan bekerja sama yang hidup di dalam masyarakat. RPJMN 2025–2029 secara eksplisit menempatkan pembangunan modal sosial budaya sebagai salah satu pilar pembangunan manusia seutuhnya. Ini menunjukkan bahwa negara mengakui pentingnya elemen-elemen nonmaterial dalam pembangunan. Tanpa kepercayaan sosial, kebijakan publik mahal dijalankan. Tanpa solidaritas, infrastruktur cepat rusak. Tanpa rasa memiliki, partisipasi warga melemah. Tanpa norma kerja sama, demokrasi mudah berubah menjadi konflik kepentingan sempit. (perpustakaan.bappenas.go.id)

Kebudayaan Nusantara menyimpan banyak mekanisme pembentuk modal sosial itu. Berbagai komunitas lokal memiliki nilai saling membantu, kewajiban timbal balik, penghormatan kepada sesepuh, musyawarah, dan keterlibatan bersama dalam urusan publik. Nilai-nilai ini membuat masyarakat mampu bergerak tanpa selalu menunggu instruksi formal negara. Dalam pembangunan desa, misalnya, modal sosial budaya menentukan apakah jalan lingkungan akan dirawat, apakah saluran air akan dibersihkan bersama, apakah warga akan ikut menjaga keamanan, dan apakah program pemerintah diterjemahkan menjadi tindakan bersama. Dengan kata lain, budaya membuat

masyarakat tidak hanya menjadi penerima kebijakan, tetapi pelaku pembangunan. (bappenas.go.id)

Bappenas pada 2020 juga menekankan bahwa modal sosial mempercepat proses pembangunan nasional, dan salah satu dimensi yang menonjol adalah ketahanan sosial budaya. Pandangan ini penting karena menunjukkan bahwa pembangunan nasional bukan hanya soal memperbanyak sumber daya, tetapi juga soal menguatkan struktur relasi yang membuat sumber daya itu efektif. Dari sini menjadi jelas bahwa membangun Indonesia dari akar budaya berarti memperlakukan kebudayaan sebagai infrastruktur sosial. Ia mungkin tidak selalu terlihat seperti jembatan atau pelabuhan, tetapi tanpa kebudayaan, jembatan sosial antarmanusia akan melemah dan pembangunan kehilangan daya tahannya. (bappenas.go.id)

4. Gotong royong sebagai etika dasar pembangunan

Jika harus memilih satu konsep yang paling sering dipandang mewakili moral sosial Indonesia, maka gotong royong berada di garis depan. Dalam publikasi resmi Kementerian Luar Negeri, gotong royong disebut sebagai salah satu inti falsafah Indonesia, secara harfiah berarti "to carry together", dan dipahami sebagai mutual cooperation for a shared goal. Makna ini sederhana, tetapi sangat mendalam. Ia menyatakan bahwa beban publik bukan ditanggung sendiri-sendiri, melainkan dipikul bersama; tujuan bersama dicapai melalui kerja bersama. Inilah etika pembangunan yang sangat penting bagi negara berkembang dan majemuk seperti Indonesia. (kemlu.go.id)

Gotong royong relevan bukan karena ia terdengar indah, tetapi karena ia menjawab masalah praktis pembangunan. Negara tidak akan pernah cukup kuat jika harus menyelesaikan semua persoalan melalui birokrasi dan anggaran formal semata. Banyak masalah hanya bisa diselesaikan jika warga ikut mengambil bagian: menjaga kebersihan lingkungan, membantu saat bencana, mendukung pendidikan anak, merawat fasilitas

umum, memelihara persaudaraan antartetangga, dan membangun usaha bersama. Dalam semua ranah ini, gotong royong bekerja sebagai energi sosial yang menurunkan biaya koordinasi dan menumbuhkan rasa memiliki terhadap hasil pembangunan. Masyarakat yang memiliki etika gotong royong cenderung lebih tangguh menghadapi krisis karena mereka tidak memulai dari keterasingan, tetapi dari relasi. (kemlu.go.id)

Lebih jauh, gotong royong dapat dibaca sebagai koreksi terhadap model pembangunan yang terlalu individualistik. Dalam masyarakat yang makin terdigitalisasi dan makin kompetitif, ada risiko bahwa pembangunan dipersempit menjadi perlombaan pribadi untuk naik kelas, tanpa peduli pada kohesi sosial. Akar budaya Nusantara mengingatkan bahwa kemajuan tanpa solidaritas akan menciptakan fragmentasi. Karena itu, membangun Indonesia dari akar budaya berarti menghidupkan kembali gotong royong bukan sebagai slogan, melainkan sebagai etika kelembagaan: dalam sekolah, pemerintahan, koperasi, kampung, perusahaan, dan komunitas digital. Nilai ini dapat menjadi jembatan antara modernisasi dan kemanusiaan. (kemlu.go.id)

5. Musyawarah, kesantunan, dan tata hubungan sosial

Selain gotong royong, akar budaya Nusantara juga kaya dengan tradisi musyawarah dan tata hubungan sosial yang menekankan kesantunan, penghormatan, dan pencarian mufakat. Walaupun bentuk dan istilahnya berbeda-beda di setiap daerah, pola dasarnya serupa: urusan bersama sebaiknya dibicarakan bersama; perbedaan tidak selalu harus diakhiri dengan menang-kalah; dan keputusan yang memiliki legitimasi sosial biasanya lebih kuat daripada keputusan yang hanya sah secara prosedural. Prinsip semacam ini sangat penting bagi pembangunan karena banyak kebijakan publik gagal bukan karena salah secara teknis, tetapi karena tidak dimusyawarahkan dengan cara yang menghormati masyarakat. ([UNESCO](http://unesco.org))

Dalam masyarakat yang majemuk, musyawarah memiliki fungsi yang lebih dalam daripada sekadar teknik rapat. Ia adalah cara membangun kepercayaan di tengah perbedaan. Dengan musyawarah, pembangunan tidak dipaksakan sebagai instruksi dari atas, tetapi diproses sebagai kesepakatan sosial yang diupayakan bersama. Ini amat relevan untuk Indonesia, sebab perencanaan pembangunan yang seragam dan sentralistis sering kali gagal menangkap kekhasan lokal. Ketika kebijakan diterjemahkan melalui ruang-ruang musyawarah yang hidup, masyarakat merasa ikut memiliki arah pembangunan. Rasa memiliki inilah yang kemudian memperkuat partisipasi, pengawasan sosial, dan keberlanjutan program. (perpustakaan.bappenas.go.id)

Akar budaya Nusantara juga mengajarkan pentingnya kesantunan dalam hubungan sosial. Kesantunan bukan sekadar formalitas, melainkan mekanisme budaya untuk menjaga martabat orang lain, menahan konflik, dan membuka ruang dialog. Dalam era media sosial yang kasar dan polarisasi politik yang mudah membelah masyarakat, nilai kesantunan justru semakin penting. Negara yang dibangun dari akar budaya tidak akan memandang sopan santun sebagai warisan kuno, tetapi sebagai teknologi sosial yang membantu menjaga kohesi dan memelihara kualitas ruang publik. Dengan demikian, pembangunan politik dan demokrasi pun memperoleh kedalaman kultural yang lebih sehat. (kemlu.go.id)

6. Bahasa daerah sebagai gudang pengetahuan dan identitas

Salah satu akar budaya paling penting dalam kehidupan bangsa adalah bahasa daerah. Bahasa bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga gudang memori, pengetahuan, nilai, humor, perasaan, dan cara mengelompokkan dunia. Ketika suatu bahasa melemah, yang hilang bukan hanya kosakata, tetapi juga seluruh horizon makna yang dikandungnya. Karena itu, fakta bahwa Indonesia memiliki 718 bahasa daerah sangat signifikan. Ini berarti Indonesia bukan hanya kaya dalam

variasi bunyi, tetapi juga kaya dalam variasi pengetahuan budaya. Pemerintah bahkan menegaskan bahwa hilangnya satu bahasa berarti hilangnya satu cara pandang, satu pengetahuan lokal, dan satu identitas budaya. ([Kemendikdasmen](#))

Pentingnya bahasa daerah bagi pembangunan semakin jelas ketika dikaitkan dengan pendidikan. Pemerintah menyatakan bahwa penggunaan bahasa daerah pada tahap awal pembelajaran membantu meningkatkan pemahaman literasi, terutama di wilayah 3T. Temuan ini sangat penting karena menunjukkan bahwa pendidikan yang baik tidak selalu dimulai dari penyeragaman, tetapi dari pengakuan atas bahasa ibu peserta didik. Artinya, membangun Indonesia dari akar budaya juga berarti membangun sistem pendidikan yang tidak memperlakukan bahasa lokal sebagai hambatan, melainkan sebagai jembatan menuju literasi dan pembelajaran yang lebih kuat. ([Kemendikdasmen](#))

Program revitalisasi yang telah menjangkau 120 bahasa daerah di 38 provinsi menunjukkan arah kebijakan yang benar. Namun, tantangan yang dihadapi tetap besar: urbanisasi, migrasi, dominasi media nasional dan global, serta menurunnya transmisi antargenerasi. Dalam konteks ini, pembangunan dari akar budaya menuntut strategi yang lebih luas daripada sekadar dokumentasi bahasa. Ia memerlukan ekosistem penggunaan: di rumah, di sekolah, di komunitas, di media lokal, dan di ruang kreatif digital. Jika bahasa daerah tetap hidup, maka fondasi identitas dan pengetahuan lokal juga tetap hidup. Ini akan memperkuat ketahanan budaya bangsa secara keseluruhan. ([Kemendikdasmen](#))

7. Pendidikan yang berakar budaya

Pendidikan adalah jantung pembangunan jangka panjang. Namun, pendidikan yang efektif tidak lahir dari kurikulum semata. Ia membutuhkan keterhubungan antara materi belajar dan dunia hidup peserta didik. Di sinilah akar budaya memainkan peran besar. Ketika sekolah menghargai bahasa daerah, cerita rakyat, seni lokal, kearifan

ekologis, dan etika komunitas, peserta didik tidak belajar dalam ruang asing. Mereka belajar dari sesuatu yang dekat, bermakna, dan membentuk jati dirinya. UNESCO menempatkan hubungan budaya dan pengetahuan sebagai bagian penting dari pembangunan berkelanjutan, sebab budaya membantu menciptakan pendidikan yang inklusif dan relevan dengan konteks. ([UNESCO](#))

Angklung memberi contoh yang baik tentang bagaimana warisan budaya dapat sekaligus menjadi media pendidikan. UNESCO menjelaskan bahwa setiap angklung menghasilkan satu nada atau akor, sehingga beberapa pemain harus berkolaborasi untuk menghasilkan melodi. Karena sifat kolaboratif itulah angklung mendorong kerja sama, disiplin, tanggung jawab, saling menghormati, konsentrasi, dan memori. Ini memperlihatkan bahwa budaya tidak hanya menyimpan isi pelajaran, tetapi juga metode pembelajaran karakter. Anak yang belajar angklung sesungguhnya tidak hanya belajar musik, tetapi juga belajar tentang pentingnya peran, koordinasi, dan harmoni. ([ICH UNESCO](#))

Membangun Indonesia dari akar budaya, karena itu, berarti membangun pendidikan yang tidak tercerabut dari lingkungan sosialnya. Sekolah dan perguruan tinggi perlu menjadi ruang di mana budaya lokal bertemu dengan ilmu modern, bukan saling meniadakan. Teknologi digital dapat digunakan untuk mendokumentasikan bahasa, mengarsipkan cerita rakyat, mengembangkan konten pembelajaran lokal, dan mempertemukan generasi muda dengan akar budayanya dalam bentuk yang baru. Dengan demikian, pendidikan tidak hanya menghasilkan manusia terampil, tetapi manusia yang cakap sekaligus berkepribadian. ([UNESCO](#))

8. Budaya sebagai fondasi kohesi sosial dan persatuan

Indonesia tidak bisa dibangun tanpa kohesi sosial. Jalan raya dan investasi tidak akan berarti banyak bila masyarakat saling curiga, konflik identitas mudah meledak, dan rasa kebangsaan melemah. Karena itu,

akar budaya Nusantara penting bukan hanya untuk identitas, tetapi untuk persatuan. Salah satu contoh paling kuat datang dari Maluku. Dalam penjelasan resmi Kementerian Agama Provinsi Maluku, *pela gandong* dipahami sebagai kearifan lokal yang mampu menjadi perekat kekuatan, membangkitkan semangat persaudaraan, membentuk karakter generasi, berkontribusi pada identitas sebagai bagian dari NKRI, dan menjadi benteng untuk mencegah konflik komunal. Contoh ini menunjukkan bahwa pranata budaya lokal dapat berfungsi sebagai mekanisme perdamaian yang amat strategis.

(<https://maluku.kemenag.go.id/>)

Kasus *pela gandong* memberi pelajaran penting: perdamaian yang kuat sering kali bukan hanya hasil regulasi, tetapi hasil ikatan sosial yang dianggap sakral oleh masyarakat. Ketika hubungan persaudaraan ditanamkan sebagai bagian dari warisan leluhur, masyarakat memiliki alasan moral untuk menahan kekerasan dan menjaga kerukunan. Inilah kekuatan budaya yang sering tidak tertangkap dalam statistik pembangunan, tetapi sangat menentukan nasib masyarakat. Pembangunan dari akar budaya berarti memberi ruang bagi pranata-pranata lokal yang terbukti memperkuat kerukunan dan integrasi.

(<https://maluku.kemenag.go.id/>)

Di tingkat nasional, logika yang sama berlaku. Pembangunan Indonesia akan lebih kokoh bila setiap komunitas merasa budaya mereka dihormati dan memiliki tempat sah dalam rumah kebangsaan. Jika masyarakat merasa identitasnya hanya ditoleransi secara formal tetapi tidak diakui secara substantif, maka alienasi sosial akan tumbuh. Sebaliknya, ketika budaya lokal diberi martabat, masyarakat lebih mudah menempatkan diri sebagai bagian dari bangsa. Dari sini, persatuan tidak lahir dari paksaan, tetapi dari pengakuan. (perpustakaan.bappenas.go.id)

9. Kearifan ekologis dan pembangunan berkelanjutan

Salah satu pelajaran terpenting dari akar budaya Nusantara adalah bahwa hubungan manusia dengan alam tidak seharusnya bersifat eksploitatif semata. Banyak komunitas lokal mengembangkan aturan adat, ritus musim, pembagian kerja, dan etika sumber daya yang menanamkan rasa hormat terhadap tanah, air, laut, dan hutan. Dalam era perubahan iklim dan krisis ekologis, pelajaran ini menjadi sangat relevan. UNESCO menegaskan bahwa budaya berkontribusi secara transversal terhadap pembangunan berkelanjutan, termasuk pada lingkungan dan keanekaragaman hayati. Ini berarti strategi lingkungan yang kuat perlu bertemu dengan etika budaya, bukan hanya bergantung pada perangkat teknis. ([UNESCO](#))

Contoh paling menonjol adalah sistem subak di Bali. UNESCO menjelaskan bahwa subak mencerminkan filosofi Tri Hita Karana yang menghubungkan alam spiritual, dunia manusia, dan alam. Sistem ini melahirkan praktik pertanian yang demokratis dan egaliter, sekaligus membuat masyarakat Bali mampu menjadi penanam padi yang sangat produktif meskipun harus menopang populasi yang padat. Subak memperlihatkan bahwa pengelolaan sumber daya yang baik tidak hanya bergantung pada infrastruktur fisik, tetapi juga pada aturan sosial, legitimasi budaya, dan pandangan hidup yang memelihara keseimbangan. ([UNESCO World Heritage Centre](#))

Dari sini, membangun Indonesia dari akar budaya berarti menempatkan kearifan ekologis lokal sebagai mitra bagi ilmu pengetahuan dan kebijakan modern. Negara tetap memerlukan bendungan, pemetaan digital, data satelit, dan teknologi hijau. Namun, semua itu akan lebih efektif bila diintegrasikan dengan pranata sosial yang dipercaya masyarakat. Dalam konteks pertanian, tata air, pesisir, dan kehutanan, budaya lokal dapat menjadi fondasi pengelolaan yang partisipatif dan berkelanjutan. Dengan begitu, pembangunan tidak hanya mengejar output ekonomi jangka pendek, tetapi juga menjaga kelangsungan hidup sosial-ekologis bangsa. ([UNESCO World Heritage Centre](#))

10. Kesenian sebagai sekolah peradaban

Seni dalam budaya Nusantara tidak semata-mata berfungsi sebagai hiburan. Ia juga berfungsi sebagai sekolah peradaban. Melalui musik, tari, teater, kerajinan, dan simbol visual, masyarakat belajar tentang keteraturan, peran, makna, disiplin, serta hubungan antargenerasi. UNESCO menunjukkan hal itu pada angklung dan batik. Angklung mengajarkan kolaborasi karena melodi hanya lahir bila beberapa pemain bekerja sama. Batik, di sisi lain, bukan sekadar kain bergambar, melainkan teknik, simbolisme, dan budaya yang meresapi hidup orang Indonesia dari lahir hingga meninggal. Kedua contoh ini menunjukkan bahwa seni adalah medium pendidikan sosial yang sangat kuat. ([ICH UNESCO](#))

Batik terutama menarik karena memadukan keindahan, keterampilan, simbol, dan identitas. UNESCO mencatat bahwa bayi digendong dengan kain batik yang sarat simbol keberuntungan, sementara orang meninggal diselimuti batik pemakaman. Artinya, batik bukan benda fesyen biasa; ia adalah bagian dari siklus hidup. Di sini terlihat bagaimana karya budaya dapat membentuk rasa kesinambungan antargenerasi. Pembangunan yang berakar budaya akan melihat seni bukan sebagai sektor mewah yang datang belakangan, melainkan sebagai wadah pembentukan identitas dan martabat bangsa. ([ICH UNESCO](#))

Ketika seni dihargai, sebuah bangsa tidak hanya menghasilkan produk, tetapi juga membangun sensitivitas. Sensitivitas penting bagi peradaban karena tanpanya pembangunan mudah menjadi kasar, utilitarian, dan reduktif. Kesenian menolong masyarakat menghargai detail, proses, simbol, dan ekspresi. Ini semua memperkaya kualitas kehidupan bersama. Oleh sebab itu, investasi pada seni dan budaya sebenarnya adalah investasi pada kualitas manusia Indonesia. ([UNESCO](#))

11. Warisan budaya dan ekonomi kreatif

Akar budaya Nusantara juga memiliki nilai ekonomi yang besar. Namun, nilai ekonomi itu lahir justru karena budaya memiliki kedalaman sosial dan simbolik. Dalam konteks global, UNESCO menempatkan kreativitas dan budaya sebagai bagian dari strategi pembangunan berkelanjutan. Di Indonesia, pengakuan UNESCO atas warisan budaya takbenda juga menunjukkan bahwa kekayaan budaya nasional memiliki daya resonansi internasional. Per Maret 2026, laman UNESCO untuk Indonesia mencatat 16 elemen yang telah terinskripsi, termasuk batik, wayang, angklung, noken, pinisi, pencak silat, gamelan, jamu, Reog Ponorogo, kolintang, kebaya, dan pantun. Pengakuan ini memperlihatkan bahwa budaya Indonesia bukan hanya penting secara domestik, tetapi juga merupakan aset reputasi global. ([ICH UNESCO](#))

Pada saat yang sama, ekonomi kreatif Indonesia juga terus diposisikan sebagai sektor strategis. Kemenparekraf menekankan peran ekonomi kreatif Indonesia di panggung internasional dan menyebut kontribusinya terhadap PDB serta ekspor setelah pandemi. Walaupun angka-angka ekonomi penting, hal yang lebih mendasar adalah bahwa sektor ini tumbuh dari kreativitas, identitas, dan warisan budaya. Produk budaya yang memiliki cerita, makna, dan keterampilan khas biasanya memiliki nilai tambah yang lebih tinggi daripada produk yang sepenuhnya generik. Dengan demikian, membangun Indonesia dari akar budaya juga berarti memperkuat rantai nilai yang menghubungkan warisan budaya dengan kewirausahaan, inovasi desain, pariwisata berkualitas, dan pasar global. (kemenparekraf.go.id)

Namun, ekonomi budaya harus dibangun dengan hati-hati. Jika budaya hanya diperlakukan sebagai komoditas, maka komunitas pemiliknya bisa terpinggirkan. Karena itu, pembangunan dari akar budaya menuntut model ekonomi yang adil: komunitas budaya harus menjadi subjek, bukan sekadar pemasok simbol. Perlindungan hak, penguatan kapasitas perajin, akses pembiayaan, regenerasi keterampilan, dan dukungan ekosistem pasar menjadi penting agar pemanfaatan ekonomi tidak

merusak kehidupan budaya itu sendiri. Inilah titik di mana pembangunan ekonomi bertemu dengan etika budaya. (perpustakaan.bappenas.go.id)

12. Pinisi, noken, dan makna kerja yang berakar

Dua contoh warisan budaya Indonesia memperlihatkan dengan jelas bagaimana akar budaya dapat menopang pembangunan: pinisi dan noken. Pada pinisi, UNESCO menekankan bahwa tradisi pembuatan kapal dan pelayaran merupakan bagian penting dari tenun sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat Sulawesi Selatan. Ini berarti pinisi bukan sekadar kapal kayu, melainkan kristalisasi dari keterampilan, kerja bersama, pengetahuan maritim, dan keberanian berlayar. Dalam konteks Indonesia sebagai negara kepulauan, warisan seperti ini sangat penting karena mengingatkan bahwa identitas nasional juga berakar pada kecakapan maritim dan peradaban pesisir. ([ICH UNESCO](#))

Noken di Papua memberi pelajaran yang lain. UNESCO menjelaskan bahwa inskripsi noken pada daftar safeguarding mendorong penguatan sanggar-sanggar noken dan keterlibatan komunitas, perusahaan, serta individu dalam upaya pelestarian. Ini menunjukkan bahwa warisan budaya dapat memicu gerakan sosial baru ketika dihargai secara serius. Noken bukan hanya kerajinan, tetapi simbol relasi, kerja, dan identitas masyarakat Papua. Ketika noken dirawat, yang sebenarnya dirawat bukan hanya benda, melainkan seluruh jaringan keterampilan dan makna yang mengitarinya. ([ICH UNESCO](#))

Dari pinisi dan noken, kita belajar bahwa membangun Indonesia dari akar budaya berarti menghargai kerja tradisional sebagai pengetahuan, bukan sekadar aktivitas ekonomi rendah nilai. Bangsa yang menghormati pengetahuan kerajinan, pelayaran, anyaman, jamu, pertanian, dan seni akan lebih mudah membangun ekonomi yang berakar dan tidak sepenuhnya bergantung pada imitasi. Kemandirian bangsa tidak lahir hanya dari industri besar, tetapi juga dari kemampuan mengolah

pengetahuan lokal menjadi nilai baru tanpa kehilangan makna aslinya. ([ICH UNESCO](#))

13. Budaya sebagai diplomasi dan citra masa depan Indonesia

Budaya tidak hanya penting untuk kohesi internal, tetapi juga untuk posisi Indonesia di dunia. Negara modern membutuhkan **soft power**, yaitu kemampuan memengaruhi dan menarik perhatian dunia bukan hanya lewat kekuatan ekonomi atau militer, tetapi juga lewat identitas, kreativitas, dan nilai. Dalam konteks ini, budaya Nusantara merupakan aset yang sangat besar. Bappenas pada Expo 2025 Osaka menampilkan Paviliun Indonesia dengan integrasi alam, budaya, dan masa depan di bawah tema "Thriving in Harmony: Nature, Culture, Future." Framing ini sangat penting karena menunjukkan bagaimana negara sendiri mulai memosisikan budaya bukan sebagai ornamen nostalgia, tetapi sebagai bagian dari narasi masa depan Indonesia. (bappenas.go.id)

Arah tersebut sejalan dengan Visi Indonesia 2045 yang dalam ringkasan eksekutifnya menekankan bahwa peran kebudayaan dalam pembangunan perlu ditingkatkan melalui kapitalisasi nilai-nilai luhur budaya bangsa dan pengembangan etos kerja. Dengan kata lain, Indonesia tidak dibayangkan menjadi negara maju dengan menanggalkan budaya, tetapi justru dengan mengolah budaya menjadi kekuatan modern. Ini adalah posisi yang sangat strategis. Di tengah globalisasi yang cenderung menyeragamkan, bangsa yang mampu tampil otentik justru lebih mudah memperoleh perhatian, kepercayaan, dan ruang kerja sama. (perpustakaan.bappenas.go.id)

Budaya, karena itu, perlu dibaca sebagai bagian dari diplomasi pembangunan. Ketika Indonesia memperkenalkan batik, gamelan, jamu, kebaya, kuliner, arsitektur, atau nilai gotong royong ke panggung internasional, yang ditampilkan bukan sekadar keragaman estetis, tetapi model kehidupan dan peradaban. Semakin kuat budaya diposisikan sebagai wajah masa depan Indonesia, semakin besar peluang Indonesia

membangun citra sebagai bangsa modern yang tetap berkepribadian.

([ICH UNESCO](#))

14. Budaya dan pengukuran kemajuan bangsa

Salah satu alasan mengapa budaya sering terpinggirkan dalam pembangunan adalah karena kemajuan terlalu sering diukur hanya lewat indikator ekonomi. Padahal, negara juga mulai mengembangkan indikator budaya. Bappenas mencatat bahwa Indeks Pembangunan Kebudayaan meningkat ke angka 74,29 pada 2024. Sinyal ini penting karena menunjukkan bahwa budaya sudah semakin dilihat sebagai dimensi pembangunan yang dapat dipantau, bukan sekadar dirayakan. UNESCO juga mengembangkan kerangka Culture|2030 Indicators untuk mengukur kontribusi budaya terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan. (bappenas.go.id)

Pengukuran seperti ini penting karena membantu mengubah cara pandang. Selama budaya hanya diposisikan sebagai hal yang “baik bila ada”, maka prioritas kebijakan akan selalu jatuh pada sektor yang lebih mudah dihitung secara finansial. Tetapi ketika budaya diukur sebagai bagian dari ketahanan sosial, pelestarian warisan, partisipasi, kreativitas, dan kualitas hidup, maka argumen untuk menempatkannya di jantung pembangunan menjadi lebih kuat. Dengan kata lain, membangun dari akar budaya juga memerlukan reformasi cara mengukur kemajuan. Negara harus belajar bahwa kualitas relasi sosial, vitalitas bahasa, partisipasi budaya, dan kekuatan warisan juga merupakan indikator kemajuan. (bappenas.go.id)

Langkah ini akan membantu Indonesia menghindari jebakan pembangunan yang sempit. Bangsa dapat saja tumbuh secara ekonomi, tetapi bila bahasa daerah punah, warisan budaya runtuh, solidaritas melemah, dan ruang publik memburuk, maka kemajuan itu sesungguhnya timpang. Karena itu, penguatan indikator budaya adalah bagian dari upaya memberi tempat setara bagi aspek-aspek kehidupan

yang selama ini kurang terlihat namun sangat menentukan mutu peradaban. (bappenas.go.id)

15. Tantangan: homogenisasi, komodifikasi, dan politisasi identitas

Meski penting, akar budaya Nusantara menghadapi tantangan yang nyata. Tantangan pertama adalah homogenisasi. Arus media global, urbanisasi, migrasi, dan dominasi budaya populer membuat banyak bahasa dan praktik budaya lokal terancam melemah. Pemerintah sendiri mengakui bahwa sebagian besar bahasa daerah berada dalam kondisi rentan atau terancam, dan hilangnya bahasa berarti hilangnya pengetahuan serta identitas. Jika tren ini dibiarkan, pembangunan Indonesia bisa menjadi modern secara teknis tetapi miskin secara simbolik. (Kemendikdasmen)

Tantangan kedua adalah komodifikasi yang berlebihan. Ketika budaya hanya dilihat sebagai produk jualan atau bahan festival, masyarakat pemilik budaya dapat kehilangan posisi. Simbol budaya dipakai luas, tetapi perajinnya tetap lemah. Pertunjukan budaya dipromosikan, tetapi generasi muda setempat tidak lagi mewarisinya. Dalam situasi seperti ini, budaya tampak hidup di panggung, tetapi mati di komunitas. Pembangunan dari akar budaya harus menolak model semacam itu. Pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan perlu berjalan bersama secara adil. (perpustakaan.bappenas.go.id)

Tantangan ketiga adalah politisasi identitas. BPS mengingatkan bahwa perubahan komposisi suku dapat menjadi potensi konflik sosial, ekonomi, dan politik bila tidak dikelola dengan baik. Ini menunjukkan bahwa keberagaman budaya tidak otomatis menjadi kekuatan; ia bisa menjadi sumber ketegangan jika keadilan lemah dan ruang dialog menyempit. Karena itu, membangun dari akar budaya tidak berarti membiarkan romantisme identitas lokal tanpa bingkai kebangsaan. Justru sebaliknya: akar budaya harus diolah menjadi jembatan, bukan benteng permusuhan. (Badan Pusat Statistik Indonesia)

16. Agenda strategis membangun Indonesia dari akar budaya

Jika Indonesia sungguh ingin dibangun dari akar budaya Nusantara, maka ada beberapa agenda strategis yang perlu diperkuat. Pertama, kebudayaan harus ditempatkan sebagai investasi jangka panjang. UU Pemajuan Kebudayaan sudah memberi dasar normatif untuk itu, dan RPJMN 2025–2029 memberi tempat pada modal sosial budaya.

Tantangannya adalah menerjemahkan pengakuan normatif itu menjadi perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang nyata. Budaya tidak boleh terus menjadi residu kebijakan. Ia harus masuk ke pusat desain pembangunan. (perpustakaan.bappenas.go.id)

Kedua, ekosistem pewarisan budaya harus diperkuat. Program revitalisasi bahasa daerah merupakan langkah penting, tetapi perlu diperluas ke pendidikan, ruang digital, kerja komunitas, dan pelatihan kreatif.

Sanggar, komunitas adat, sekolah, perguruan tinggi, lembaga seni, dan pemerintah daerah harus dipandang sebagai jaringan bersama dalam menjaga transmisi budaya. Budaya hidup bukan karena diarsipkan semata, tetapi karena dipraktikkan, dipelajari, dan diwariskan.

(Kemendikdasmen)

Ketiga, pembangunan lokal harus lebih peka terhadap pranata budaya. Pelajaran dari subak, pela gandong, angklung, batik, pinisi, dan noken menunjukkan bahwa banyak warisan budaya Indonesia mengandung prinsip-prinsip tata kelola, pendidikan, atau ekonomi yang masih relevan.

Negara perlu belajar dari prinsip-prinsip itu: partisipasi, keseimbangan, solidaritas, keberlanjutan, penghormatan pada komunitas, dan kerja bersama. Dengan begitu, modernisasi tidak bekerja dengan meratakan budaya, melainkan dengan berdialog dengannya. (UNESCO World Heritage Centre)

Keempat, budaya harus diintegrasikan dengan strategi masa depan Indonesia. Visi 2045, RPJMN, dan narasi diplomasi budaya seperti Expo Osaka memberi sinyal bahwa hal ini sudah mulai dilakukan. Langkah

berikutnya adalah menjadikannya lebih konsisten: budaya hadir dalam kebijakan pendidikan, ekonomi kreatif, tata ruang, diplomasi, pengembangan kota, pembangunan desa, dan transformasi digital. Dengan cara itu, akar budaya Nusantara benar-benar menjadi fondasi, bukan sekadar tema pidato. (perpustakaan.bappenas.go.id)

17. Indonesia Emas 2045 dan kepribadian bangsa

Visi Indonesia Emas 2045 sering dikaitkan dengan negara maju, pendapatan tinggi, SDM unggul, dan daya saing global. Semua itu sah dan penting. Namun, negara maju yang diidealkan Indonesia seharusnya bukan negara yang kehilangan kepribadian budayanya. Justru dalam ringkasan visi pembangunan jangka panjang, peran kebudayaan disebut perlu ditingkatkan melalui kapitalisasi nilai-nilai luhur budaya bangsa dan pengembangan etos kerja. Artinya, jalan menuju 2045 tidak dibayangkan sebagai penyalinan model luar secara mentah, tetapi sebagai jalan yang berakar pada peradaban Indonesia sendiri. (perpustakaan.bappenas.go.id)

Ini penting karena banyak negara berkembang tergoda mengidentikkan modernitas dengan penanggalan identitas lokal. Akibatnya, mereka mungkin tumbuh secara ekonomi, tetapi rapuh secara kultural dan sosial. Indonesia memiliki peluang untuk menempuh jalan yang berbeda: modern tanpa kehilangan akar; terbuka tanpa tercerabut; maju tanpa menolak ingatan kolektifnya. Dalam konteks itu, budaya bukan rem kemajuan, melainkan kompas. Ia menolong bangsa memilih model pembangunan yang tidak hanya efisien, tetapi juga adil, berkepribadian, dan berkelanjutan. ([UNESCO](http://unesco.org))

Jika Indonesia berhasil menjaga keseimbangan ini, maka Indonesia Emas 2045 tidak hanya berarti negara kaya, tetapi negara beradab. Negara beradab adalah negara yang mampu menghormati keragamannya, merawat warisannya, menyusun kebijakan yang kontekstual, dan menempatkan manusia sebagai pusat pembangunan. Dalam negara

seperti itu, budaya tidak diperlakukan sebagai beban masa lalu, melainkan sebagai energi masa depan. ([UNESCO](#))

Penutup

Pada akhirnya, membangun Indonesia dari akar budaya Nusantara berarti mengakui satu kebenaran mendasar: bangsa ini lahir, tumbuh, dan bertahan bukan karena keseragaman, melainkan karena kemampuan mengolah keragaman menjadi kehidupan bersama. Suku-suku, bahasa-bahasa daerah, seni, pengetahuan lokal, pranata sosial, etika gotong royong, musyawarah, persaudaraan, dan kearifan ekologis semuanya merupakan bagian dari fondasi kebangsaan Indonesia. Ketika fondasi itu kuat, pembangunan akan memiliki legitimasi sosial, daya tahan moral, dan kedalaman peradaban. Ketika fondasi itu dilemahkan, pembangunan mudah menjadi rapuh, eksklusif, dan tercerabut dari masyarakatnya. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Karena itu, budaya tidak boleh lagi diposisikan hanya sebagai ranah seremonial. Ia harus dibaca sebagai modal sosial, sumber identitas, penggerak ekonomi kreatif, sarana pendidikan karakter, perangkat integrasi nasional, dan pilar keberlanjutan. Negara yang kuat bukan negara yang menyingkirkan budayanya demi efisiensi, tetapi negara yang mampu mengubah warisan budayanya menjadi kapasitas kolektif untuk menghadapi zaman. Dalam arti itulah, akar budaya Nusantara bukan nostalgia, melainkan strategi. Ia memberi arah agar Indonesia dapat maju tanpa kehilangan dirinya sendiri.

(perpustakaan.bappenas.go.id)

Dengan demikian, proyek pembangunan Indonesia yang paling menjanjikan adalah proyek yang mengawinkan kebudayaan dan transformasi. Infrastruktur fisik tetap dibangun, teknologi tetap dikembangkan, investasi tetap dikejar, pendidikan tetap diperkuat, dan daya saing tetap ditingkatkan. Namun, semua itu diletakkan di atas tanah sosial yang subur: budaya Nusantara. Bila hal itu dilakukan secara

konsisten, maka Indonesia bukan hanya akan tumbuh, tetapi juga bertumbuh; bukan hanya menjadi besar, tetapi juga berjiwa; bukan hanya menjadi modern, tetapi juga berkepribadian. Itulah makna terdalam dari membangun Indonesia dari akar budaya Nusantara. (bappenas.go.id)

Glosarium

Akar budaya Nusantara — landasan nilai, bahasa, pengetahuan, simbol, adat, dan praktik hidup yang tumbuh dari keragaman masyarakat kepulauan Indonesia dan menjadi pijakan identitas serta pembangunan bangsa.

Kearifan budaya — himpunan pengetahuan, etika, kebiasaan, dan cara hidup yang diwariskan antargenerasi serta dipakai masyarakat untuk menata hubungan sosial, alam, dan kehidupan bersama.

Modal sosial budaya — kemampuan kolektif masyarakat yang bertumpu pada kepercayaan, norma bersama, solidaritas, dan partisipasi sosial, yang dalam RPJMN diposisikan sebagai salah satu pilar pembangunan manusia seutuhnya.

Gotong royong — prinsip kerja sama timbal balik untuk tujuan bersama; dalam publikasi resmi Indonesia dipahami sebagai salah satu tenet inti filsafat sosial Indonesia.

Musyawarah — cara menyelesaikan urusan bersama melalui pembicaraan, pertimbangan bersama, dan pencarian mufakat yang memberi legitimasi sosial pada keputusan publik.

Keragaman budaya — keberadaan banyak suku, bahasa, adat, dan ekspresi budaya dalam satu ruang kebangsaan; BPS menggambarkan Indonesia sebagai masyarakat yang sangat heterogen.

Bahasa daerah — bahasa ibu komunitas lokal yang menjadi medium pewarisan identitas, pengetahuan, tata krama, dan memori kolektif.

Revitalisasi bahasa daerah — upaya terencana untuk menghidupkan kembali penggunaan bahasa daerah melalui pendidikan, komunitas, dan kolaborasi antarlembaga; hingga 2025 telah menjangkau 120 bahasa daerah di 38 provinsi.

Warisan budaya takbenda — warisan budaya yang tidak bersifat kebendaan, seperti tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, dan olahraga tradisional.

Subak — sistem pengelolaan air dan pertanian di Bali yang mencerminkan kerja sama komunal dan filosofi *Tri Hita Karana*, serta diakui UNESCO sebagai lanskap budaya dunia.

Tri Hita Karana — filsafat Bali yang menekankan harmoni antara ranah spiritual, dunia manusia, dan alam.

Pela gandong — pranata persaudaraan sosial-budaya di Maluku yang dipahami sebagai perekat kekuatan sosial, pembentuk karakter, dan benteng pencegah konflik komunal.

Ekonomi kreatif berbasis budaya — aktivitas ekonomi yang bertumpu pada kreativitas, warisan budaya, identitas, dan inovasi, serta dipandang pemerintah sebagai bagian penting dari daya saing Indonesia.

Diplomasi budaya — pemanfaatan budaya sebagai sarana membangun citra, pengaruh, dan kerja sama internasional; hal ini tampak dalam narasi resmi Indonesia di Expo 2025 Osaka.

Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) — indikator pembangunan yang dipakai untuk menilai kemajuan kebudayaan; Bappenas melaporkan IPK mencapai 74,29 pada 2024.

Daftar Pustaka (APA 7)

Badan Pusat Statistik. (2015, November 18). *Mengulik data suku di Indonesia.*

Badan Pusat Statistik. (2024). *Profil suku dan keragaman bahasa daerah hasil Long Form Sensus Penduduk 2020.*

Indonesia. (2017). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.*

Kementerian Agama Provinsi Maluku. (2022, February 20). *Kearifan lokal pagar kerukunan beragama di Maluku.*

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2019, December 3). *Harmony of Indonesia in pictures.*

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. (2025, March 1). *Wamendikdasmen mendukung revitalisasi bahasa daerah sebagai upaya pelestarian identitas bangsa.*

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. (2026, February 19). *Kolaborasi revitalisasi bahasa daerah, jaring praktik baik bersama pemda, guru, dan pemuda.*

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. (2024, June 27). *Menparekraf paparkan peran ekonomi kreatif bagi ASEAN dalam Annual Meeting of the New Champions 2024 di Tiongkok.*

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (n.d.). *Visi Indonesia 2045.*

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2025). *RPJMN tahun 2025–2029.*

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2024, October 10). *Satu dekade pemerintahan Jokowi: Capaian dan pondasi menuju Indonesia Emas 2045*.

UNESCO. (2023, May 11). *Thematic factsheet: Culture & sustainable development*.

UNESCO. (n.d.). *Indonesia*. Intangible Cultural Heritage.

UNESCO. (n.d.). *Indonesian angklung*.

UNESCO. (n.d.). *Indonesian batik*.

UNESCO World Heritage Centre. (n.d.). *Cultural landscape of Bali Province: The Subak system as a manifestation of the Tri Hita Karana philosophy*.

Copilot for this article - Chatgpt 5.2 Thinking. Access date: 9 Maret 2026
Prompting on Writer's account (Rudy C Tarumingkeng)

<https://chatgpt.com/c/69aeaf84-ce58-8399-87ec-eeedcbd66738>